

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu disusun untuk memberi gambaran mengenai penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini, sekaligus menunjukkan posisi dan kebaruan yang ditawarkan. Penelitian ini membahas kegiatan pembekalan dan diskusi pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Dewan Kesenian Semarang (Dekase) dalam membangun ruang aman berkesenian. Oleh karena itu, penelitian terdahulu yang dipilih mencakup empat aspek yang saling berkaitan, yaitu pembangunan ruang aman di komunitas seni melalui forum partisipatif, sosialisasi dan diskusi kelompok dalam menyusun mekanisme internal penanganan kekerasan seksual, kesiapan regulasi dan SOP sebagai instrumen pencegahan kekerasan seksual pada sebuah lembaga, serta pembekalan atau pelatihan sebagai strategi peningkatan kapasitas komunitas seni.

Penelitian pertama dilakukan oleh Lasari dan Dewi (2025) dengan judul **Festival Women Ngalam Bergerak sebagai Wadah Penggerak Aktivisme Feminis di Malang Raya**. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap penyelenggaraan festival tahunan yang digagas oleh Paguyuban Literasi Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa festival ini menghadirkan forum diskusi bertema ruang aman, pameran karya, dan lokakarya yang mempertemukan aktivis, akademisi, seniman, dan komunitas marjinal untuk membahas kerentanan perempuan di ruang publik, termasuk di lingkungan komunitas seni. Penelitian ini relevan karena sama-sama menempatkan forum diskusi berbasis komunitas seni sebagai instrumen membangun ruang aman dari kekerasan seksual. Perbedaannya terletak pada cakupan dan sasaran kegiatan. Lasari dan Dewi meneliti festival tahunan lintas komunitas yang terbuka untuk publik luas di Malang Raya, sedangkan penelitian ini berfokus pada kegiatan pembekalan dan diskusi internal

yang diselenggarakan bersama satu lembaga seni, yaitu Dekase, untuk merumuskan SOP penanganan kekerasan seksual secara khusus.

Penelitian kedua dilakukan oleh Haryadi, Farahika, Djalil, Munawaroh, dan Sari (2024) dengan judul **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di PT Nippon Piston Ring**. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pendampingan yang diberikan kepada perwakilan pengusaha dan pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi peraturan yang diikuti diskusi kelompok berhasil mengubah pemahaman literal peserta menjadi pemahaman kritis, sehingga peserta sepakat membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual beserta panduan operasionalnya. Penelitian ini relevan karena sama-sama menggunakan tahapan sosialisasi atau pembekalan yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk membangun mekanisme internal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Perbedaannya terletak pada konteks kelembagaan. Haryadi dkk. meneliti perusahaan manufaktur dengan pendekatan hukum ketenagakerjaan, sedangkan penelitian ini mengkaji lembaga seni budaya dengan pendekatan *event management* dan *Public Relations*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rahmadani, Suriani, dan Ali (2025) dengan judul **Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya**. Penelitian hukum normatif ini mengevaluasi kesiapan regulasi internal, mekanisme pelaporan, dan tingkat kesadaran sivitas akademika terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan SOP dan unit khusus yang menangani kekerasan seksual, disertai rendahnya sosialisasi, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual. Penelitian ini relevan karena menegaskan pentingnya SOP dan sosialisasi berkelanjutan sebagai instrumen pencegahan, sejalan dengan fokus penelitian ini pada penyusunan SOP internal Dekase. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan objek kajian.

Rahmadani dkk. menggunakan pendekatan hukum normatif pada lingkungan kampus, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *event management* melalui kegiatan pembekalan dan diskusi langsung pada komunitas seni.

Penelitian keempat dilakukan oleh Sabri, Trisakti, Rahayu, Karoso, dan Basri (2024) dengan judul **Pelatihan Manajemen Pementasan pada Siswa Sekolah Indonesia Kuala Lumpur untuk Meningkatkan Kemampuan Penciptaan Pagelaran Pementasan Seni Pertunjukan**. Penelitian pengabdian ini memberikan pelatihan manajemen pementasan kepada siswa dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam menciptakan pagelaran seni pertunjukan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembekalan yang dirancang secara terstruktur mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta di bidang manajemen seni. Penelitian ini relevan karena sama-sama menempatkan pembekalan sebagai metode intervensi untuk meningkatkan kapasitas komunitas seni. Perbedaannya terletak pada sasaran dan materi pembekalan. Sabri dkk. memberikan pembekalan manajemen pementasan kepada siswa sekolah, sedangkan penelitian ini memberikan pembekalan mengenai regulasi kekerasan seksual dan urgensi SOP kepada pengurus Dekase, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi pembahasan SOP.

Berdasarkan keempat penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu memiliki fokus yang beragam, mulai dari pembangunan ruang aman melalui forum komunitas, pembentukan mekanisme internal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja, kesiapan regulasi dan SOP di lingkungan kampus, hingga pembekalan keterampilan dalam bidang seni pertunjukan. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan kegiatan pada pembekalan dan diskusi penyusunan SOP penanganan kekerasan seksual dalam satu lembaga seni budaya, yaitu Dewan Kesenian Semarang (DEKASE). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai satu rangkaian event dengan melibatkan DEKASE dan Yayasan Sahwahita serta menggunakan pendekatan *Event Management* dan fungsi *Public Relations*. Dengan demikian, posisi penelitian ini terletak pada integrasi pembekalan dan diskusi penyusunan SOP sebagai rangkaian kegiatan yang

diarahkan untuk membangun mekanisme perlindungan dan ruang aman berkesenian di lingkungan DEKASE.

Ditinjau dari empat aspek, yaitu isu, objek, metode, dan produk yang dihasilkan, penelitian ini berbeda dari keempat penelitian terdahulu. Dari sisi isu, penelitian ini mengangkat kekerasan seksual di lingkungan komunitas seni yang belum banyak diangkat pada penelitian sebelumnya. Dari sisi objek, penelitian ini mengambil Dewan Kesenian Semarang sebagai lembaga seni budaya, berbeda dari objek penelitian terdahulu berupa komunitas lintas kota, perusahaan manufaktur, lingkungan kampus, dan sekolah. Dari sisi metode, penelitian ini menggabungkan pendekatan *Event Management* dengan *Focus Group Discussion* dalam satu rangkaian kegiatan pembekalan dan diskusi. Dari sisi produk, penelitian ini menghasilkan draf SOP internal yang disusun melalui proses pembahasan bersama DEKASE dan Yayasan Sahwahita, berbeda dari luaran penelitian terdahulu berupa forum ruang aman, satuan tugas, rekomendasi regulasi, atau peningkatan keterampilan teknis.

Tabel 2.1 Kajian Pustaka dan Pembaharuan

Aspek	Penelitian 1 Lasari & Dewi (2025)	Penelitian 2 Haryadi dkk. (2024)	Penelitian 3 Rahmadani dkk. (2025)	Penelitian 4 Sabri dkk. (2024)	Pembaruan dalam Penelitian Ini
Lokasi & Subjek	Malang Raya; Paguyuban Literasi Malang dan komunitas Women Ngalam Bergerak	Kabupaten Pasuruan; perwakilan pengusaha dan pekerja PT Nippon Piston Ring	Universitas Palangka Raya; sivitas akademika	Sekolah Indonesia Kuala Lumpur; siswa jurusan seni	Kota Semarang; Dewan Kesenian Semarang (Dekase), Yayasan Sahwahita, dan pelaku seni dari berbagai cabang seni
Metode	Kualitatif studi kasus melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi	<i>Participatory Action Research</i> melalui sosialisasi dan diskusi kelompok	Hukum normatif melalui studi pustaka dan analisis regulasi	Pengabdian masyarakat melalui pelatihan teori dan praktik	<i>Event Management</i> melalui pembekalan dan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> pembahasan SOP

Aspek	Penelitian 1 Lasari & Dewi (2025)	Penelitian 2 Haryadi dkk. (2024)	Penelitian 3 Rahmadani dkk. (2025)	Penelitian 4 Sabri dkk. (2024)	Pembaruan dalam Penelitian Ini
Output	Forum ruang aman, pameran karya, dan komunitas advokasi berkelanjutan	Kesepakatan pembentukan Satgas dan panduan operasional	Rekomendasi penguatan SOP dan sistem pelaporan kampus	Peningkatan keterampilan manajemen pementasan peserta	Draf SOP internal Dekase untuk mekanisme ruang aman berkesenian
Fokus	Ruang aman perempuan lintas komunitas melalui festival tahunan	Pembentukan mekanisme internal pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja	Kesiapan regulasi dan SOP pencegahan kekerasan seksual di kampus	Pembekalan keterampilan teknis seni pertunjukan	Pembekalan pemahaman kekerasan seksual dan perumusan SOP internal lembaga seni
Pendekatan	Aktivisme komunitas dan gerakan sosial baru	Pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hukum preventif	Hukum normatif dan kebijakan institusi pendidikan	Pendidikan seni dan pengembangan keterampilan	<i>Event Management</i> dan <i>Public Relations</i> , dengan Konsep Pembekalan (<i>Capacity Building</i>) serta Konsep SOP dan FGD sebagai metode perumusannya

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Public Relations*

Public Relations (PR) atau Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai publik yang memengaruhi keberhasilan organisasi tersebut (Broom & Sha, 2002). Seiring perkembangan praktik komunikasi organisasi, peran *Public Relations* tidak lagi terbatas pada pembentukan citra positif, tetapi juga berkembang menjadi fungsi komunikasi strategis yang membangun kepercayaan, memfasilitasi komunikasi dua arah, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dan para pemangku kepentingan.

Di Indonesia, praktik *Public Relations* terus berkembang seiring

meningkatnya kebutuhan organisasi untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Jurnal Komunikasi Indonesia (2025) menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja *Public Relations* mencakup penyusunan dan penyuntingan materi komunikasi, pengelolaan hubungan dengan media dan *stakeholder*, penyelenggaraan kegiatan (*event*), penyusunan siaran pers, pemberian saran strategis kepada organisasi, serta pelaksanaan berbagai aktivitas komunikasi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, *Public Relations* tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung yang mampu membangun kolaborasi dan menciptakan kesepahaman di antara berbagai pihak yang terlibat.

Dalam proyek Tugas Akhir ini, pendekatan *Public Relations* diterapkan melalui penyelenggaraan kegiatan Pembekalan dan Diskusi Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Dewan Kesenian Semarang dalam Membangun Ruang Aman Berkesenian sebagai bagian dari strategi komunikasi organisasi. Peran *Public Relations* diwujudkan melalui proses lobi, negosiasi, koordinasi, serta pengelolaan komunikasi antara DEKASE, Yayasan Sahwahita, dan para pengurus organisasi selama tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan pembekalan dan diskusi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi media untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat kolaborasi antar *stakeholder*, serta mendukung serta mendukung proses penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai mekanisme penanganan kekerasan seksual di lingkungan DEKASE.

2.2.1.1 Fungsi *Public Relations*

Broom & Sha, (2002) bahwa fungsi utama PR mencakup tujuh bidang kegiatan yang saling berkaitan. Fungsi-fungsi ini menjadi panduan dalam praktik PR modern dan relevan untuk diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembekalan dan diskusi ini.

1. Fungsi Hubungan Media (*Media Relations*), yaitu

membangun dan memelihara hubungan yang produktif dengan para jurnalis dan media massa untuk memastikan informasi tentang kegiatan organisasi dapat tersampaikan kepada publik yang lebih luas.

2. Fungsi Publisitas (*Publicity*), yaitu penyebarluasan informasi secara terencana kepada khalayak melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, baik media cetak, elektronik, maupun digital.
3. Fungsi Komunikasi (*Communication*), yaitu mengelola aliran informasi dua arah antara organisasi dan publik-publiknya untuk memastikan terjadi pemahaman bersama yang akurat dan berkelanjutan.
4. Fungsi Urusan Publik (*Public Affairs*), yaitu membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan organisasi maupun komunitas yang dilayani.
5. Fungsi Manajemen Isu (*Issues Management*), yaitu mengidentifikasi, memantau, dan merespons isu-isu yang berpotensi mempengaruhi reputasi dan keberlangsungan organisasi secara proaktif sebelum isu berkembang menjadi krisis.
6. Fungsi Lobi (*Lobbying*), yaitu upaya komunikasi langsung dengan pembuat kebijakan untuk memengaruhi keputusan yang berdampak pada organisasi atau komunitas tertentu.
7. Fungsi Hubungan Investor (*Investor Relations*), yaitu pengelolaan komunikasi dengan para pemangku kepentingan finansial untuk menjaga kepercayaan dan transparansi dalam tata kelola organisasi.

Dalam konteks Tugas Akhir ini, fungsi komunikasi, urusan publik, dan manajemen isu menjadi yang paling dominan. Kegiatan

Pembekalan dan Diskusi Pembahasan SOP diselenggarakan sebagai wujud nyata dari fungsi-fungsi tersebut, di mana mahasiswa berperan sebagai praktisi PR yang memfasilitasi komunikasi dua arah, mengelola isu kekerasan seksual di komunitas seni secara proaktif, dan membangun hubungan yang konstruktif antara Dewan Kesenian Semarang dan Yayasan Sahwahita sebagai lembaga pendamping.

2.2.1.2 Tujuan *Public Relations*

Tujuan *Public Relations* dapat dipahami dari dua perspektif utama, yaitu tujuan komunikasi dan tujuan organisasional. Dari perspektif komunikasi, *Public Relations* bertujuan membangun pemahaman bersama (*mutual understanding*) antara organisasi dan publiknya melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan berkesinambungan. Sementara itu, dari perspektif organisasional, *Public Relations* bertujuan membangun, memelihara, dan meningkatkan reputasi organisasi melalui hubungan yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian Zuraini & Haryati, (2023) mengenai strategi *Public Relations* dalam membangun citra organisasi menunjukkan bahwa tujuan *Public Relations* modern tidak lagi berorientasi pada komunikasi satu arah, melainkan menekankan dialog, kolaborasi, dan penyelesaian masalah bersama. Dalam praktiknya, *Public Relations* memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai *expert prescriber* yang memberikan rekomendasi atas permasalahan komunikasi, *communication facilitator* yang menjembatani komunikasi antara organisasi dengan publiknya, serta *problem solving process facilitator* yang membantu organisasi dalam merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam proyek Tugas Akhir ini, ketiga peran tersebut diterapkan melalui proses lobi, negosiasi, koordinasi, serta penyelenggaraan kegiatan ini yang melibatkan Dewan Kesenian Semarang (DEKASE) dan Yayasan Sahwahita sebagai mitra dalam

memperkuat mekanisme penanganan kekerasan seksual di lingkungan organisasi.

Melalui kegiatan tersebut, tujuan *Public Relations* yang ingin dicapai adalah membangun kesamaan pemahaman antara DEKASE dan Yayasan Sahwahita mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta mendukung proses pembahasan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman penanganan kasus di lingkungan DEKASE. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung implementasi mekanisme perlindungan yang lebih terstruktur bagi pelaku seni.

2.2.2 Event Management

Event management atau manajemen acara merupakan sebuah proses terencana yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi suatu kegiatan yang dirancang untuk mempertemukan orang-orang dengan tujuan tertentu. Bladen, Wilde, Kennell, dan Abson (2023) mendefinisikan *event management* sebagai praktik pengelolaan acara yang mencakup seluruh dimensi teknis, manajerial, dan komunikatif dalam mewujudkan sebuah event dari tahap ide hingga pascaacara. Dalam konteks hubungan masyarakat, *event management* bukan sekadar urusan teknis logistik, melainkan merupakan instrumen strategis untuk membangun relasi, mengomunikasikan pesan, dan menciptakan perubahan di tingkat komunitas (Bladen et al., 2023).

Di Indonesia, penerapan *event management* dalam bidang komunikasi dan *Public Relations* telah banyak digunakan sebagai strategi untuk membangun hubungan dengan publik melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penelitian Julietta, Koswara, dan Sunarya (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh proses *event management* yang dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan konsep, perencanaan teknis, koordinasi pelaksanaan,

hingga evaluasi pascakegiatan. Selain itu, penelitian mengenai implementasi *event management* dalam praktik *Public Relations* menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana membangun kolaborasi, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, serta mendukung terciptanya perubahan positif dalam organisasi maupun komunitas (ResearchGate, 2024).

Sebagai *Event Manager*, penulis bertanggung jawab dalam merancang konsep kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, mengelola kebutuhan teknis acara, memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai. Penerapan prinsip-prinsip event management tersebut bertujuan agar kegiatan tidak hanya berjalan sesuai dengan perencanaan, tetapi juga mampu mendukung tercapainya tujuan proyek, yaitu memberikan pembekalan kepada pengurus DEKASE serta memfasilitasi pembahasan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman penanganan kekerasan seksual di lingkungan organisasi.

2.2.2.1 Jenis – Jenis Event Management

Goldblatt, (2010) membagi *event* ke dalam beberapa kategori besar berdasarkan tujuan dan konteks penyelenggaraannya. Pembagian ini kemudian dikembangkan oleh berbagai peneliti selanjutnya dan masih relevan hingga saat ini. Secara umum, jenis event dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Civic Event* yaitu *event* yang diselenggarakan untuk kepentingan publik dan komunitas, seperti forum diskusi, musyawarah warga, dan sarasehan. Jenis *event* ini biasanya bertujuan menghasilkan kesepakatan bersama atau kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
2. *Corporate Event*, yaitu acara yang diselenggarakan oleh atau untuk kepentingan sebuah organisasi atau perusahaan, seperti konferensi pers, peluncuran produk, dan *gathering* karyawan.

Event jenis ini umumnya memiliki tujuan komunikasi yang jelas, baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) organisasi.

3. *Social Event*, yaitu acara yang bersifat perayaan atau penghargaan, seperti pesta ulang tahun, pernikahan, dan gala dinner. Meski terkesan lebih informal, *social event* tetap memerlukan pengelolaan yang terencana dan profesional.
4. *Fundraising Event*, yaitu acara yang bertujuan mengumpulkan sumber daya finansial untuk mendukung suatu program atau lembaga nonprofit. *Event* jenis ini banyak diselenggarakan oleh lembaga sosial dan organisasi nirlaba untuk membiayai kegiatan advokasi mereka.
5. *Educational* atau *Advocacy Event*, yaitu *event* yang berfokus pada transfer pengetahuan, peningkatan kesadaran, atau pengadvokasian suatu isu tertentu kepada khalayak sasaran.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, kegiatan Pembekalan dan Diskusi Pembahasan SOP Internal DEKASE dalam proyek Tugas Akhir ini termasuk dalam kategori *Educational* atau *Advocacy Event*, karena berfokus pada transfer pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta pengadvokasian pentingnya SOP dan kanal pelaporan kepada pengurus DEKASE. Kegiatan ini juga memuat unsur Civic Event, karena forum diskusi dan pembahasan SOP yang diselenggarakan bertujuan menghasilkan kesepakatan bersama antara DEKASE dan Yayasan Sahwahita mengenai mekanisme penanganan kekerasan seksual yang akan diterapkan di lingkungan organisasi.

Operasionalisasi ini juga diperlukan untuk membedakan event dalam proyek Tugas Akhir penulis dengan event dalam proyek Tugas Akhir rekan satu tim yang membahas Dekase yang sama, karena keduanya sama-sama berbentuk *event* namun berada pada

tahap yang berbeda dalam satu rangkaian proses. *Event* yang dikelola penulis, yaitu Pembekalan dan Diskusi Pembahasan SOP, berada pada tahap perumusan substansi, di mana peserta membahas dan menyepakati isi draf SOP melalui *Focus Group Discussion* (FGD) tanpa disertai penandatanganan dokumen final. Sementara itu, event yang dikelola rekan tim, yaitu Sosialisasi dan Launching Kanal Pelaporan, berada pada tahap pengesahan dan peresmian, di mana SOP yang telah disepakati pada FGD ditandatangani secara resmi bersama MoU antara DEKASE dan Yayasan Sahwahita serta Surat Keputusan (SK) Penanggung Jawab kanal pelaporan. Dengan demikian, kedua event tersebut tidak tumpang tindih, melainkan saling berkelanjutan, di mana hasil event penulis menjadi input bagi event rekan tim.

Pertanyaan mengenai mengapa penyusunan SOP tidak cukup dilakukan melalui penyusunan dokumen administratif atau *workshop* teknis semata perlu dijawab melalui nilai tambah yang ditawarkan pendekatan *Event Management Public Relations*. Penyusunan SOP secara administratif umumnya dikerjakan secara tertutup oleh pihak internal tanpa melibatkan pihak yang akan menjalankan SOP tersebut, sehingga berisiko menghasilkan dokumen yang kurang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Workshop teknis pada umumnya juga hanya berhenti pada transfer pengetahuan tanpa menghasilkan dokumen kebijakan yang disepakati bersama. Pendekatan *Event Management Public Relations* menawarkan nilai tambah melalui beberapa aspek. *Event* memberikan struktur yang jelas mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga evaluasi, sehingga proses penyusunan SOP tidak berjalan secara asal. *Event* juga menetapkan forum khusus yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu waktu dan tempat, sekaligus mengintegrasikan sesi pembekalan sebagai bekal pengetahuan bagi peserta sebelum masuk ke tahap

pembahasan substansi SOP. Selain itu, *event* membuka ruang partisipasi *stakeholder*, dalam hal ini DEKASE dan Yayasan Sahwahita, sehingga SOP yang dihasilkan merupakan produk diskusi dan koordinasi bersama, bukan dokumen yang disusun sepihak. Proses ini turut membangun *engagement* atau keterlibatan peserta terhadap SOP yang mereka rumuskan sendiri, sehingga peluang penerapannya di lapangan menjadi lebih tinggi dibandingkan SOP yang disusun tanpa keterlibatan pengguna akhir.

2.2.2.2 Proses *Event Management*

Proses *event management* mengacu pada tahapan sistematis yang harus dilewati oleh penyelenggara dari awal hingga akhir pelaksanaan acara. Goldblatt, (2010) merumuskan lima tahapan kritis dalam proses *event management*, yaitu riset, desain, perencanaan, koordinasi, dan evaluasi. Penerapan kelima tahapan ini terbukti menentukan keberhasilan sebuah *event*, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Julietta, Koswara, dan Sunarya (2023) yang menganalisis strategi pengelolaan *event* secara terstruktur pada konteks *marketing public relations*, serta penelitian Halim & Santoso, (2025) yang mengkaji pengelolaan *corporate event* dalam memperkuat hubungan dengan *stakeholder* perusahaan.

Tahap pertama adalah Riset (*Research*), yaitu proses pengumpulan informasi awal terkait kebutuhan, harapan, dan potensi hambatan dalam penyelenggaraan *event*. Dalam proyek Tugas Akhir ini, tahap riset dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan Ketua Dewan Kesenian Semarang (DEKASE), perwakilan enam cabang seni, perwakilan seniman laki-laki, serta Yayasan Sahwahita untuk mengidentifikasi kondisi yang melatarbelakangi perlunya pembekalan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan seksual di lingkungan DEKASE.

Tahap kedua adalah Desain (*Design*), yaitu penyusunan konsep

kegiatan yang meliputi penentuan tema, tujuan, sasaran peserta, bentuk kegiatan, materi pembekalan, narasumber, susunan acara, serta kebutuhan teknis penyelenggaraan. Pada tahap design, konsep kegiatan dirancang agar mampu mendukung penyampaian materi pembekalan sekaligus memfasilitasi proses pembahasan draft SOP penanganan kekerasan seksual bersama DEKASE dan Yayasan Sahwahita.

Tahap ketiga adalah Perencanaan (*Planning*), yaitu penyusunan rencana operasional secara rinci untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Tahap ini meliputi penyusunan anggaran, pembagian tugas panitia, koordinasi dengan Dewan Kesenian Semarang (DEKASE) dan Yayasan Sahwahita, persiapan materi pembekalan, penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP), serta persiapan berbagai kebutuhan teknis sebelum kegiatan dilaksanakan.

Tahap keempat adalah Koordinasi (*Coordination*), yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada tahap ini dilakukan koordinasi antara panitia, narasumber, peserta, serta seluruh pihak yang terlibat agar kegiatan pembekalan dan diskusi pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat berlangsung dengan tertib, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tahap kelima adalah Evaluasi (*Evaluation*), yaitu proses penilaian terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan setelah acara selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan meninjau keterlaksanaan kegiatan, efektivitas koordinasi, kelancaran pelaksanaan acara, serta hasil pembahasan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai salah satu luaran proyek Tugas Akhir.

2.2.3 Kegiatan Management

Kegiatan manajemen dalam penyelenggaraan suatu kegiatan menerapkan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi planning (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan

controlling (pengendalian) atau dikenal dengan konsep POAC. Keempat fungsi tersebut menjadi dasar dalam mengelola sumber daya, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif (Jurnal Media Akademik, 2025).

1. Tahap Perencanaan (*Planning*) merupakan proses penyusunan rencana kegiatan yang meliputi penetapan tujuan, sasaran peserta, tema kegiatan, materi pembekalan, narasumber, jadwal, anggaran, serta kebutuhan teknis penyelenggaraan. Dalam proyek Tugas Akhir ini, tahap perencanaan juga mencakup penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) serta koordinasi awal dengan Dewan Kesenian Semarang (DEKASE) dan Yayasan Sahwahita.
2. Tahap Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan proses pembagian tugas, penetapan tanggung jawab, serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan selama penyelenggaraan kegiatan. Pada proyek ini, tahap tersebut diwujudkan melalui pembagian tugas panitia, koordinasi dengan narasumber, serta pengaturan kebutuhan administrasi dan teknis kegiatan.
3. Tahap Pelaksanaan (*Actuating*) merupakan pelaksanaan seluruh rencana yang telah disusun. Dalam proyek ini, tahap pelaksanaan meliputi kegiatan pembekalan oleh Yayasan Sahwahita, diskusi pembahasan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta pengenalan mekanisme kanal pelaporan dan Penanggung Jawab Ruang Aman kepada peserta.
4. Tahap Pengendalian (*Controlling*) merupakan proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Setelah kegiatan selesai, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, koordinasi antarpihak, serta hasil pembahasan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai luaran proyek.

2.2.4 Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)

Frasa "Diskusi Pembahasan SOP" pada judul penelitian ini merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dokumen yang menjadi fokus utama pembahasan dalam kegiatan ini. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan mendefinisikan SOP sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis, yang disusun untuk memandu pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien agar tercapai hasil yang sesuai standar yang ditetapkan. Meskipun regulasi ini secara spesifik mengatur instansi pemerintahan, prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan diterapkan pada organisasi nonpemerintah seperti Dekase, terutama dalam hal kejelasan alur kerja dan kejelasan penanggung jawab pada setiap tahap penanganan.

Keberadaan SOP penting bagi sebuah lembaga karena memberikan kepastian mengenai langkah yang harus ditempuh ketika menghadapi suatu persoalan, termasuk dalam konteks penanganan kekerasan seksual. Tanpa SOP yang jelas, penanganan kasus cenderung dilakukan secara ad hoc dan bergantung pada inisiatif perorangan, sehingga rawan menimbulkan ketidakpastian bagi korban maupun pengurus lembaga yang menangani laporan. Dalam penelitian ini, penulis menyusun draf awal SOP berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dekase, perwakilan seniman, serta masukan dari Yayasan Sahwahita, sebelum draf tersebut dibahas bersama pada tahap pelaksanaan kegiatan. Pembahasan draf SOP dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai metode partisipatif. *Wijaya dan Perdana (2023)* menjelaskan bahwa FGD merupakan teknik diskusi kelompok terarah yang bertujuan memperoleh pemahaman bersama mengenai suatu isu melalui pertukaran gagasan dan informasi antaranggota kelompok, di mana setiap peserta memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapatnya.

Melalui FGD, Dekase dan Yayasan Sahwahita memberikan masukan dan tanggapan terhadap draf SOP yang telah disusun, sehingga dokumen akhir yang dihasilkan bukan produk yang disusun sepihak oleh penulis, melainkan hasil revisi yang mempertimbangkan kesepakatan bersama pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan ruang aman berkesenian di Dekase.

